

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN  
DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP KINERJA  
KEUANGAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI  
JAWA TENGAH TAHUN 2013-2014**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S1

Dalam Ilmu Ekonomi Islam



Disusun Oleh :

**ST MUSTAGHFIROH**

**122411196**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2016**

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag**

**NIP. 19700410 199503 1 001**

Perum Griya Pandana Merdeka Blok H.2, Ngaliyan, Semarang

**Dr. Ari Kristin P., SE.,M.Si**

**NIP. 19790512 200501 2 004**

Jl.Perintis Kemerdekaan No.181 Pudukpayung, Banyumanik

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp: 4 (empat) eksemplar

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

An. Sdri. St Mustaghfiroh

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas Ekonomi**

**Dan Bisnis Islam**

UIN Walisongo

Di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya selesai meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : **St Mustaghfiroh**

NIM : **122411196**

Jurusan : **Ekonomi Islam**

Judul : **“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Jawa Tengah Tahun 2013-2014”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*WassalamualaikumWr. Wb*

Semarang, 23 Mei 2016

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dr. H. Imam Yahya, M.Ag**

**NIP. 197004101995031001**



**Dr. Ari Kristin P, SE, M.Si**

**NIP.197905122005012004**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : St Mustaghfiroh  
fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Judul : **Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah Tahun 2013-2014.**

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal:

10 Juni 2016

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2015/2016

Semarang, 10 Juni 2016

Penguji I

Mohammad Nadzir, SHi, M.Si.  
NIP. 197309232003121002

Penguji III

Dr. H. Muusahadi, M.Ag.  
NIP. 196907091994031003

Pembimbing I

Dr. H. In'am Yahya, M.Ag.  
NIP. 197004101995031001

Penguji II

Dr. Ari Kristin P, SE, M.Si.  
NIP. 197905122005012004

Penguji IV

Drs. H. Hasyim Svarbani, MM.  
NIP. 19690830 199403 2 003

Pembimbing II

Dr. Ari Kristin P, SE, M.Si.  
NIP. 197905122005012004



## MOTTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke syurga”

(HR. Muslim)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتْقِنَهُ

“ Sesungguhnya Allah senang jika seseorang diantara kamu mengerjakan suatu perbuatan lalu dia mengerjakan secara sempurna”

(HR. Thabrani)

*“Nothing is impossible, anything can happen as long as we believe”*

## **PERSEMBAHAN**

Hanya sebuah karya sederhana, kupersembahkan teruntuk orang-orang terkasih dan tersayang seuntai kata yang mampu saya ucapkan kepada:

- Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan dan membekaliku dengan ilmu. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya karya yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
- Almamater saya UIN Walisongo Semarang, para Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (khususnya dosen yang mengampu mata kuliah di Jurusan Ekonomi Islam)
- Pembimbing Saya, Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag dan Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, SE, Msi, terima kasih banyak pak...bu..., saya sudah dibantu selama ini, dinasehati, diajari, saya tidak akan lupa atas bantuan dan kesabaran dari bapak dan ibu. Terima kasih banyak pak..bu.., bapak dan ibu adalah dosen favorit saya.
- Ayahanda Sutarman dan Ibunda Kusmini, karya ini ananda persembahkan sebagai tanda bukti hormat, rasa terimakasih atas kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga serta tiada mungkin dapat ananda balas hanya dengan selembar kertas yang tertulis kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membahagiakan ayah dan ibu, karena kusadari selama ini belum dapat berbuat yang lebih. Terimakasih dan aku selalu mencintai ayah dan ibu.
- Kakak dan adik-adik saya (Sulistiyono, Bejo Santoso, Moh. Ilham, Melda Safira) atas motivasi, dukungan, serta kasih sayangnya.
- Untuk Abang Indra Agustian terimakasih atas segala kasih sayang, dukungan dan do'anya.
- Teruntuk sahabat-sahabat saya "Suhartini's Girl" Imamah, Ciloh, Ncess, Sutia, Sulatip, Jijah, Munjiarsih, Umek, Nenok, Epok, Jolien, Jihanara, Semut, Ina, Kesi, Tini. Mungkin kalian bukan sahabat yang baik malah

terlalu gila tapi percayalah saya sayang dengan kalian, terimakasih untuk segala candaan garing hingga gilanya, untuk segala bantuannya, untuk segala kenangan indah yang tak mungkin saya lupakan, dan segala warna hidup selama empat tahun saya di Semarang.

- Keluarga besar “EIB Angkatan 2012” tersayang, terima kasih atas perhatian dan kehangatan kekeluargaan yang selalu tercurahkan.
- Keluarga besar “KSPM Walisongo” terkasih, terima kasih atas kontribusi kekeluargaan yang membekas dihati.
- Keluarga “BMC Walisongo” yang tak berhenti untuk selalu memberi dukungan, semangat dan bantuannya.
- Teman-teman tim “KKN posko 20”, yang selalu memberi semangat dan motivasi serta kebahagiaan selama melaksanakan KKN.
- Dan yang terakhir teruntuk semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan serta motivasi sehingga karya ini dapat terselesaikan.

## DEKLARASI

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, 23 Mei 2016

Deklarator



**ST MUSTAGHFIROH**

**NIM. 122411196**

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf arab harus disalin kedalam huruf latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan suatu transliterasi sebagai berikut:

### 1. Konsonan

أ = a	د = d	ض = dl	ك = k
ب = b	ذ = dz	ط = th	ل = l
ت = t	ر = r	ظ = zh	م = m
ث = ts	ز = z	ع = ‘	ن = n
ج = j	س = s	غ = gh	و = w
ح = h	ش = sy	ف = f	ه = h
خ = kh	ص = sh	ق = q	ي = y

### 2. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

### 3. Diftong

يَا = ay

أَوْ = aw

### 4. Syaddah (◌ْ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda

### 5. Kata sandang (...ال)

Kata sandang (...ال)ditulis dengan *al-* .... . *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

### 6. Ta' marbutah (◌ِة)

Setiap *ta' marbutah*ditulis dengan "h"

## ABSTRAK

Dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah merupakan organ-organ perusahaan yang sangat penting dalam lembaga keuangan syariah. Peran setiap organ perusahaan sangat penting dalam pelaksanaan kinerja dan pengawasan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan atau kepentingan pribadi yang dilakukan dalam perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan BPRS di Jawa Tengah tahun 2013-2014. Variabel dalam penelitian ini yaitu ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah, sedangkan kinerja keuangan diprosikan dengan ROA.

Populasi dari penelitian ini adalah seluruh BPRS yang beroperasi selama periode 2013-2014, dan telah mempublikasikan laporan keuangannya di *website* Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan jumlah sampel sebanyak 48 diambil dengan menggunakan metode nonprobabilitas (secara tidak acak) berdasarkan kriteria (*purposive sampling*). Teknik pengumpulan data diambil berdasarkan teknik dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014. Hasil ini dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 5,190 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 ( $< 0,05$ ). Ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014. Hal ini dibuktikan pada uji t yang menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,971 dengan nilai probabilitas (Sig-t) sebesar 0,005 yang nilainya dibawah level signifikan 0,05. Pada ukuran dewan komisaris nilai t hitung sebesar 0,657 dengan signifikansi 0,515, yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014. Sedangkan ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 3,155 dengan nilai probabilitas (Sig-t) 0,003 yang nilainya dibawah 0,05. Dengan kata lain hipotesis (H1 dan H3) diterima dan H0 ditolak, sedangkan H2 ditolak dan H0 diterima.

**Kata Kunci:** *Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Ukuran Dewan Pengawas Syariah, ROA.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rahman, dan rahim-Nya sehingga penyusun mendapat kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah Tahun 2013-2014”. Skripsi ini merupakan syarat akademis dalam menyelesaikan pendidikan S1 Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak, yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. Untuk itu dikesempatan kali ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Ahmad Furqon, Lc., M.A dan Bapak Mohammad Nadzir, SHi., M.Si, selaku Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Ari Kristin Prasetyoningrum, S.E, M. Si, selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Yunita Dewi Septiana, selaku Dosen Wali yang selalu memberikan nasehatnya kepada penulis selama perkuliahan.
6. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan banyak ilmu sebagai bekal penulisan

skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan atas pengajaran dan arahnya terhadap penyelesaian skripsi ini.

7. Segenap karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah mendukung terselesaikannya skripsi ini.
8. Bapak/Ibu pengelola perpustakaan UIN Walisongo Semarang yang telah membantu dalam pengumpulan referensi dan literature.
9. Bank-bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah yang telah menginspirasi dan memberikan informasi kepada penulis untuk melakukan penelitian.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

Semarang, 23 Mei 2016

Penulis

**ST MUSTAGHFIROH**

**NIM. 122411196**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.2 Perumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3 Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.4 Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.5 Sistematika Penyusunan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2 Kepengurusan BPRS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.1 Dewan Direksi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.2 Dewan Komisaris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.3 Dewan Pengawas Syariah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2.4 Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Prinsip Kerja Organ Perusahaan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3 Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah ..	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.3.1 Kinerja Perusahaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

2.3.2 Kinerja Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4 Penelitian Terdahulu.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.6 Pengembangan Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1 Jenis dan Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.1 Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.2 Jenis Data.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1.3 Sumber Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2 Populasi dan Sampel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.1 Populasi .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.2.2 Sampel .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.1 Ukuran Dewan Direksi.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.2 Ukuran Dewan Komisaris .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah ....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.4.4 Return On Asset (ROA).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5 Teknik Analisis Data .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.1 Analisis Deskriptif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.2 Analisis Inferensial .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.5.2.2 Uji Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2 Hasil Analisis Data dan Uji Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2 Uji Asumsi Klasik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2.1 Uji Normalitas .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

4.2.2.2 Uji Multikolinieritas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3 Uji Hipotesis .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F Test) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.2.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3 Pembahasan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan (ROA) .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan (ROA).....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB V PENUTUP.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.1 Kesimpulan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5.2 Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DATA PENELITIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
STATISTIK DESKRIPTIF .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI HIPOTESIS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BIODATA PENULIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 Jumlah BPRS dan Aset serta DPK BPRS periode Tahun 2012-2014  
.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 2 Kriteria Penilaian Peringkat ROA.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 3 Perolehan sampel penelitian.....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 5 Daftar Nama dan Alamat BPRS Sampel..**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 6 Hasil Analisis Deskriptif Rata-rata ROA dan Elemen GCG ..... **Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 7 Hasil Uji Normalitas .....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 8 Hasil Uji Multikolinieritas .....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 9 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 10 Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 11 Hasil Uji Signifikansi Simultan .....**Error! Bookmark not defined.**
- Tabel 12 Koefisien Determinasi .....**Error! Bookmark not defined.**

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Skema Kerangka Pemikiran .....**Error! Bookmark not defined.**

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Prosentase Kinerja BPRS Tahun 2013-2014.... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 2 Uji Statistik Deskriptif variabel ROA, DD, DK, DPS..... **Error! Bookmark not defined.**

Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik Dan Uji Hipotesis.**Error! Bookmark not defined.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia selalu berupaya untuk menjadi negara yang mampu memperbaiki sistem ekonomi dengan memperbaiki sistem kerja dan peluang usaha yang bisa dimanfaatkan sebagai upaya menuju pertumbuhan ekonomi yang dapat bersaing dengan negara-negara lain.<sup>1</sup> Dalam hal tersebut Indonesia harus menata perekonomiannya terutama dalam hal bisnis dan perbankan yang menjadi sorotan tajam bagi negara-negara tetangga. Bank dan institusi Keuangan Non Bank berperan sangat penting dalam perekonomian suatu negara karena membantu memediasi aliran dana dari masyarakat yang kelebihan dana (*surplus*) kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*defisit*). Lembaga keuangan turut pula berperan dalam pertukaran produk (barang dan jasa) melalui uang dan instrumen kredit. Selain itu, lembaga keuangan turut memberikan jaminan keamanan dan moral atas dana-dana masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia dikelola secara benar, tertib hukum, terintegrasi, dan profesional demi menjaga citra dan kualitas lembaga-lembaga keuangan tersebut.<sup>2</sup>

Untuk menjadi negara yang dapat memajukan perekonomian masyarakat, tentunya harus menata perekonomian mulai dari dasar yaitu dimulai dari tingkat masyarakat kecil. Dengan mengembangkan usaha-usaha masyarakat baik itu skala kecil, menengah bahkan skala besar. Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat membantu masyarakat dalam

---

<sup>1</sup>Warno, *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah 1*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2012, hlm. 1

<sup>2</sup> Tri Hendro & Conny Tjandra Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014, hlm iii

hal pendapatan dan bisa membantu mengurangi angka pengangguran yang menjadi permasalahan utama di Indonesia. Maka dari itu perkembangan UMKM menjadi fokus utama perhatian pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah salah satu lembaga keuangan yang mengutamakan sistem pelayanan dengan cepat dan proses yang mudah dengan persyaratan yang ringan sehingga masyarakat dari setiap kalangan dapat menggunakannya demi kelancaran usaha yang sedang dijalankan. Sesuai sistem perbankan nasional, BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sektor UMKM ini yang menjadikan BPR Syariah berbeda pangsa pasarnya dengan Bank Umum/Bank Umum Syariah. Dalam sistem perbankan syariah, BPR Syariah merupakan salah satu bentuk BPR yang pengelolaannya harus berdasarkan prinsip syariah. Dengan pelayanan yang mempermudah masyarakat tersebut, diharapkan BPRS mampu memberi kontribusi yang unggul terhadap perkembangan UMKM dikalangan masyarakat pinggiran kota bahkan pedesaan. Apalagi di Jawa Tengah populasi UMKM yang besar mendorong BPRS memberikan pelayanan jasa keuangan yang memadai bagi perkembangan UMKM Jawa Tengah. Untuk memaksimalkan perannya tersebut maka BPRS harus menata seluruh kinerja dan proses regulasi internalnya yang meliputi fungsi dan tugas dari organ-organ perusahaan. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Lihat Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/Pbi/2009

**Tabel 1**  
**Jumlah BPRS dan Aset serta DPK BPRS periode Tahun 2012-2014**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah BPRS</b>	<b>Aset BPRS</b>	<b>Jumlah DPK</b>
2012	24	Rp. 444,429 jt	Rp. 298,362 jt
2013	25	Rp. 548.353 jt	Rp. 384.431 jt
2014	25	Rp. 647.601 jt	Rp. 452.935 jt

Sumber: data dari statistik Bank Indonesia

Perkembangan BPRS di Jawa Tengah cukup meningkat dengan jumlah aset pada tahun 2012 sebesar Rp. 444,429 jt dengan jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 298,362 jt, pada 2013 sebesar Rp. 548.353jtjumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 384.431 jt, kemudian pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 647.601 jt dengan total Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp. 452.935 jt, meskipun jumlah BPRS tidak mengalami kenaikan karena pada tahun 2013 terdapat 25 BPRS Jawa Tengah dan pada tahun selanjutnya yaitu 2014 masih tetap 25 BPRS yang berdiri.<sup>4</sup> Peningkatan aset dan jumlah dana pihak ketiga (DPK) BPRS di Jawa Tengah dikarenakan adanya tanggung jawab dari organ-organ perusahaan yang menjalankan kinerjanya dengan baik sehingga tidak ada unsur korupsi atau manipulasi dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut yang pada akhirnya akan meningkat jumlah dana yang didapatkan dari pihak ketiga.

Perkembangan lembaga keuangan yang semakin tahun semakin meningkat menjadikan ancaman tersendiri bagi kelangsungan perkembangan BPRS. Karena telah kita ketahui di Indonesia banyak sekali lembaga-lembaga keuangan yang mulai bermunculan dengan menyodorkan keunggulannya untuk menarik minat masyarakat. Sehingga BPRS diharapkan mampu menata kinerja keuangannya agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Untuk meraih kinerja keuangan yang maksimal dibutuhkan penataan dalam internalisasi BPRS yaitu dengan manajemen yang baik khususnya pemilihan organ-organ perusahaan yang berkompeten dan bertanggung jawab

---

<sup>4</sup>Statistik Perbankan Syariah Desember 2013 dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Desember 2014, diakses pada tanggal 29 Oktober 2015

bagi BPRS. Akhlak dan moral para pemangku kepentingan sangat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan karena apabila para pemangku kepentingan tersebut melanggar kode etik yang telah ditentukan maka KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme akan dengan mudah terjadi dan akan mempermudah terjadinya manajemen laba, sehingga akan berpengaruh pada laporan keuangan.

Peraturan dan ketentuan mengenai tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab serta jumlah personil organ-organ perusahaan tersebut telah ditentukan oleh peraturan Bank Indonesia, sehingga setiap lembaga keuangan termasuk lembaga keuangan syariah harus mengikuti dan menerapkannya dalam sistem internal perusahaan.

Setiap perusahaan termasuk yang bergerak dibidang jasa tentunya tidak memungkiri adanya profit yang dituju dari kegiatan operasionalnya. Tetapi tidak hanya profit yang akan menjadi dasar kelangsungan hidup perusahaan. Komponen utama dalam sebuah bisnis adalah laba (*profit*), proses, dan pekerja (*people*). Sebaliknya banyak pula para pengelola perusahaan yang cenderung memfokuskan pada mengejar laba (*profit*) saja, dan sangat rendah perhatiannya pada kedua komponen lainnya, terutama komponen organ perusahaan. Sedang dalam kenyataannya ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain setiap organisasi/perusahaan, terutama yang berskala menengah dan besar tidak mungkin meraih laba untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya sebagai tujuan strategik tanpa mampu meraih laba kompetitif (perspekif keuangan) secara berkelanjutan dan tanpa proses bisnis yang mampu menghasilkan produk (perspektif bisnis internal) yang berkualitas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen (perspektif pelanggan)<sup>5</sup>.

Menyadari pengelolaan yang sangat penting dalam peningkatan kinerja perbankan, maka diperlukan pengelolaan bank secara profesional.

---

<sup>5</sup>Hadari Nawawi, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 210

Dan salah satu cara dalam pengelolaan tersebut dibutuhkan yang namanya tata kelola perusahaan yang baik. Sejak terjadi krisis nasional pada tahun 1997 yang membuat perekonomian Indonesia menjadi tidak kondusif, isu tentang tata kelola perusahaan yang baik menjadi mengemuka. Tidak kondusifnya perekonomian tersebut dikarenakan buruknya tata kelola perusahaan-perusahaan dan pemerintah termasuk perbankan.

Tata kelola perusahaan yang baik yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Selain itu, penerapan manajemen yang baik dapat meningkatkan nilai, citra dan kinerja perusahaan serta kontinuitas usaha perusahaan.

Pengelolaan manajemen yang baik di perusahaan maupun perbankan saat ini bukan hanya menjadi kewajiban tetapi sudah menjadi kebutuhan dalam setiap kegiatan operasionalnya. Demikian juga pada lembaga keuangan perbankan syariah yang meliputi bank umum syariah dan unit usaha syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dewasa ini minat masyarakat terhadap bank syariah cukup besar. Dalam tiap provinsi yang mayoritas muslim hampir sebagian menghendaki pelayanan perbankan syariah karena sudah mengerti produk dan layanan yang ditawarkan. Sehingga semakin lama pertumbuhan dan perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia tumbuh begitu pesat yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah jaringan serta pelayanan dan semakin beragamnya produk bank syariah menyebabkan pengelolaan manajemen yang baik pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menjadi semakin penting. Satu hal yang membedakan tata kelola perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan lainnya adalah pada ketaatan tata kelola perusahaan yang sesuai prinsip islam (*syariah compliance*) yang selalu mengedepankan azas, etika dan nilai-nilai ajaran islam. Sesuai dengan ajaran islam, sebagaimana dalam Q.S Almaidah ayat 8, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَاعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ  
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ <sup>6</sup>

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Selain dalil Al-Qur'an diatas, tata kelola perusahaan yang baik berkaitan dengan hadits Rosulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya” sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan baik”.<sup>7</sup>Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang keadilan, yaitu perlakuan yang sama terhadap semua pemangku kepentingan dari berbagai bentuk kecurangan.

Pengelolaan perusahaan yang baik serta peran dan fungsi manajemen menentukan kinerja suatu bank dalam menghasilkan keuntungan. Sehingga maju tidaknya kegiatan operasional bank tergantung pada pengelolaan manajemen keuangan yang baik serta peran penting organ perbankan yaitu Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris dan Direksi. Peran organ perusahaan yang tidak berjalan dengan baik akan berdampak pada operasional perusahaan karena tidak bisa mengawasi dan mengontrol bagaimana proses kegiatan oleh bank Syariah dan Unit Usaha Syariah serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang diawasi. Selain itu juga jumlah atau ukuran organ perusahaan yang terlalu banyak atau bahkan terlalu sedikit akan mempengaruhi kinerja bank yang tidak optimal. Jika ketiga komponen

<sup>6</sup> QS. Al Maidah ayat 8

<sup>7</sup>GCG Menurut Perpektif Islam-<http://susanto-edogawa.blogspot.co.id/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.html?>. diakses tanggal 24 Oktober 2015

diatas berjalan secara seimbang maka kinerja perusahaan akan berjalan dengan baik dan tujuan perusahaan pun akan mudah dicapai.

Pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktifitas dan sumber daya yang perlu dipertanggungjawabkan.<sup>8</sup> Laporan keuangan dalam setiap perusahaan termasuk perbankan merupakan kinerja yang mendasar karena hal tersebut mengindikasikan sehat tidaknya kondisi suatu bank. Penulisan laporan keuangan akan menarik minat investor dan kepercayaan dari masyarakat karena masyarakat akan menilai apakah bank mengalami laba ataupun kerugian. Pengukuran kinerja yang menggambarkan prestasi yang dicapai dalam penelitian ini menggunakan ROA. Analisis rasio yang banyak digunakan dalam menganalisis keuanganyaitu ROA (*Return On Asset*) yang merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan ke dalam seluruh aktiva perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, sehingga semakin tinggi keuntungan semakin tinggi nilai ROA pada perbankan.

Dari penjelasan diatas, maka penyusun tertarik untuk meneliti kinerja keuangan BPRS dengan menggunakan indikator ROA (*Return On Asset*). Penelitian tentang dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah memang telah banyak dilakukan, tetapi penelitian tersebut mencakup studi kasus yang berbeda. Maka penyusun dalam hal ini bermaksud akan menyusun penelitian yang lebih difokuskan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan mengambil judul **“Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah Tahun 2013-2014”**.

---

<sup>8</sup>Gabriela Cynthia Indah dan Fidelis Arastyo Andono, *Pengaruh Penerapan Corporate Governanace Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception Governance (IICG)*, Jurnal Ilmiah, Surabaya: Universitas Surabaya, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, 2013, hlm. 5

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, dapat diangkat rumusan masalah yaitu:

1. Apakah ukuran Dewan Direksi berpengaruh pada kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014?
2. Apakah ukuran Dewan Komisaris berpengaruh pada kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014?
3. Apakah ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh pada kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014?
4. Apakah ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah secara bersama-sama berpengaruh pada kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari indikator:

1. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014.
2. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014.
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014.

4. Untuk mengetahui pengaruh ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah 2013-2014.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan dan para pemegang saham yang ingin menerapkan konsep *Good Corporate Governance* terhadap peningkatan kinerja perusahaan, khususnya bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada para pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

2. Manfaat bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur bagi teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau yang akan melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

3. Manfaat bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penyusun mengenai pengaruh pelaksanaan *Good Good Corporate Governance* di Jawa Tengah, khususnya pengaruh terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

#### **1.5 Sistematika Penyusunan**

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan.

- BAB II** Tinjauan Pustaka. Terdiri dari teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan/landasan dalam menganalisis masalah pokok yang telah dikemukakan, kerangka pemikiran, dan hipotesis.
- BAB III** Metode Penelitian. Terdiri dari jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel penelitian, dan teknik analisis data.
- BAB IV** Hasil Penelitian. Terdiri dari analisis data dan pembahasan untuk menguraikan deskripsi objek penelitian, analisis kuantitatif, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian.
- BAB V** Penutup. Terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah**

Bank adalah penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat. Bank bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional demi meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan mendorong stabilitas nasional dengan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Di Indonesia, menurut jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat. Pasal 1 ayat 3 UU No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam hal lalu lintas pembayaran.<sup>1</sup>

Perbankan di Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Bank syariah merupakan bagian dari pelaksanaan ekonomi islam yang meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Bab 1 ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 “ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. <sup>2</sup> Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang beroperasi dengan sistem syariah berdasarkan UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/2004 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Berdasarkan

---

<sup>1</sup>Muhammad Nadzaruzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm. 17

<sup>2</sup>Anggota IKAPI, *Kitab Undang-undang Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokus Media, 2011 hlm. 35

Prinsip Syariah. Dengan adanya BPRS diharapkan layanan kepada UMKM dapat berlangsung mudah, cepat dan persyaratan yang dibutuhkan ringan.<sup>3</sup>

Berdirinya BPR Islam di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (*Rate Interest*), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga. Dalam al-Qur'an surat QS. Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ  
الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ  
إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ<sup>4</sup>

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Sedangkan tujuan operasioanalisis BPR Islam yaitu:

<sup>3</sup> Rahardja, *Bank & Institusi*..... hlm 235

<sup>4</sup>QS. Al-Baqarah ayat 275

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan.
2. Menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan, sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi.
3. Membina ukhuwah islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka peningkatan pendapatan per kapita menuju kualitas hidup yang memadai.<sup>5</sup>

Menurut surat keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah, ditentukan bahwa syarat-syarat pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah:

1. BPRS hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan izin Direksi Bank Indonesia.
2. BPRS hanya didirikan dan dimiliki oleh:
  - a. WNI
  - b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI.
  - c. Pemerintah daerah, atau
  - d. Dua pihak atau lebih sebagaimana disebutkan diatas.
3. Modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
  - a. Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah atau Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya dan Kabupaten/KotaMadya Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Karawang.
  - b. Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) untuk BPRS yang didirikan di wilayah Ibu Kota Provinsi di luar wilayah seperti tersebut pada butir a di atas.
  - c. Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk BPRS yang didirikan di luar wilyah yang tersebut pada butir a dan b di atas.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 129-130

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm135-136

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi bank melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Undang-undang. Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 21, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
  2. Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- b. Menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk:
  1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*,
  2. Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam* atau *istishna'*,
  3. Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*,
  4. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan
  5. Pegambilalihan utang berdasarkan akad *hawalah*
- c. Menempatkan dana pada bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah,
- d. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS, dan,
- e. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Anggota IKAPI, *Kitab Undang-undang....*, hlm. 49

Untuk menjaga konsistensi dan kelangsungan usaha BPR, ditentukan bahwa:

1. BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.
2. BPRS tidak diperkenankan untuk mengubah kegiatana usahanya menjadi BPR konvensional.
3. BPRS yang semula memiliki izin usahanya sebagai BPR konvensional dan telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha menjadi berdasarkan prinsip syariah, tidak diperkenankan untuk mengubah status menjadi BPR konvensional.<sup>8</sup>

## **2.2 Kepengurusan BPRS**

Kepengurusan suatu BPRS dilakukan oleh suatu dewan direksi atau pimpinan dengan diawasi oleh suatu dewan komisaris atau dewan pengawas atau badan pengawas atau badan pemeriksa.<sup>9</sup> Organ-organ perusahaan tersebut menjadi indikator terpenting bagi pelaksanaan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, karena disadari atau tidak hal itu turut mempengaruhi kinerja dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta proporsi pengurus harus diperhatikan, karena jika melebihi atauun kurang dari standar yang ditentukan akan berkibat bagi perkembangan perusahaan.

### **2.2.1 Dewan Direksi**

Direksi adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bentuk badan hukum BPRS adalah Perseroan Terbatas. Pasal 23 (1) Direksi mengelola BPRS sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku bagi perbankan syariah. (2) Direksi bertanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan BPRS

---

<sup>8</sup> Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam...*, hlm. 143

<sup>9</sup> Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam...*, hlm. 136

sebagai lembaga intermediasi dengan memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Ketentuan mengenai Dewan Direksi BPRS diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/Pbi/2009 Pasal 24 Tentang Peraturan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

- (1) Jumlah anggota Direksi BPRS paling sedikit 2 (dua) orang.
- (2) Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur atau Direktur Utama.
- (3) Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari anggota Direksi termasuk Direktur Utama harus berpengalaman operasional paling kurang:
  - a. (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau pembiayaan di perbankan syariah;
  - b. 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan di perbankan konvensional dan memiliki pengetahuan di bidang perbankan syariah; atau
  - c. (tiga) tahun sebagai direksi atau setingkat dengan direksi di lembaga keuangan mikro syariah.
- (4) Anggota Direksi berpendidikan formal paling kurang setingkat Diploma III atau Sarjana Muda.
- (5) Anggota Direksi wajib memiliki sertifikasi kelulusan dari lembaga sertifikasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah tanggal pengangkatan efektif.
- (6) Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya wajib bersikap independen dalam menjalankan tugasnya.
- (7) Direktur Utama wajib berasal dari pihak independen terhadap PSP.

Pada Pasal 25 tentang larangan Dewan Direksi, yaitu:

- (1) Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di sekitar tempat kedudukan kantor pusat BPRS.
- (2) Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan:

- a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar; dan/atau
  - b. anggota Dewan Komisaris dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, besan, menantu, suami, istri atau saudara kandung.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS atau Pejabat Eksekutif pada lembaga keuangan, badan usaha atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada pihak lain.<sup>10</sup>

### **2.2.2 Dewan Komisaris**

Komposisi Dewan Komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi akuntansi serta untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Melalui fungsi pengawasannya dapat mempengaruhi penulisan laporan keuangan dari pihak manajemen sehingga laba yang berkualitas dapat diperoleh. Oleh karena itu, Dewan Komisaris merupakan inti dari *Good Corporate Governance*.

Dewan Komisaris bertugas untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap BPRS.

1. Pengawasan yang dilakukan Dewan Komisari adalah untuk pengendalian dan pembinaan terhadap penyelenggaraan tugas

---

<sup>10</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/Pbi/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Direksi, yang bersifat ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi lain diluar BPRS.

2. Pengendalian dilaksanakandalam bentuk pemberian petunjuk dan engrahan kepada Direksi selama Direksi menjalankan tugasnya.
3. Pembinaan dilakukan untuk menjaga kelangsungan dan meningkatkan kualitas BPRS.

Untuk melaksanakan tugas di atas, maka dewan Komisaris mempunyai fungsi:

1. Menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS.
2. Mengawasi kepengurusan BPRS.
3. Menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS.
4. Membina dan mengembangkan BPRS.

Dewan Komisaris memiliki wewenang:

1. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran BPRS kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
2. Meneliti laporan neraca laporan laba rugi yang disamapaikan Direksi untuk mendapatkan pengesahan RUPS.
3. Memberikan pertimbangan dan saran, diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan BPRS.
4. Meminta keterangan Direksi mengenai hal-halyang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPRS.
5. Mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi melalui RUPS.
6. Menunjuk satu orang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dewan Komisaris BPRS mencakup ketua dan anggota yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Ketua Dewan Komisaris bertugas: (1) memimpin seluruh kegiatan anggota, (2) menyusun program kerja sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS, (3) Memimpin rapat-

rapat yang diselenggarakan Dewan Komisaris, serta (4) membina dan meningkatkan kualitas tugas anggota.

- b. Anggota Dewan Komisaris bertugas untuk membantu Dewan Komisaris sesuai bidang yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, dan melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan anggota Dewan Komisaris.

Agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, anggota Dewan Komisaris dilarang:

1. Memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.
2. Memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi.
3. Mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung kepada BPRS, atau Badan Hukum atau perorangan yang memperoleh dana dari BPRS.
4. Kepala daerah dan wakilnya tidak boleh menjabat sebagai Dewan Komisaris.<sup>11</sup>

### **2.2.3 Dewan Pengawas Syariah**

Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan penyempurnaan SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. SE BI ini mengatur mengenai tata cara dan pelaksanaan tugas pengawasan penerapan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank

---

<sup>11</sup>Hendro & Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan...* hlm. 242-244

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan prinsip syariah. Pengawasan penerapan Prinsip Syariah oleh DPS mencakup: (a) pengawasan terhadap produk dan ktivitas baru BPRS; dan (b) pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.<sup>12</sup>

Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain meliputi:

1. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI.
3. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS.
4. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional BPR Syariah secara keseluruhan dalam laporan publikasi BPRS.
5. Mengkaji produk dan jasa baru yang akan dikeluarkan oleh BPRS untuk dimintakan fatwa kepada DSN.
6. Meminta dokumen dan penjelasan langsung (apabila diperlukan) dari satuan kerja BPRS serta ikut dalam pembahasan intern termasuk dalam pembahasan komite pembiayaan.<sup>13</sup>

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/Pbi/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pasal 30 mengenai jumlah Dewan Pengawas Syariah:

---

<sup>12</sup>Otoritas Jasa Keuangan, Suratedaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs

<sup>13</sup> Hendro & Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan....* hlm. 245-246

- (1) Jumlah anggota DPS paling sedikit 2 (dua) orang dan palingbanyak 3 (tiga) orang.
- (2) DPS dipimpin oleh seorang ketua yang berasal dari salah satu anggota DPS.<sup>14</sup>

#### **2.2.4 Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Sebagai Prinsip Kerja Organ Perusahaan**

Keberhasilan kinerja suatu perusahaan tergantung pada kualitas manajemen internalnya. Apabila manajemen internal dijalankan sesuai peraturan yang telah ditetapkan dan para pemangku kepentingan dengan senantiasa menjalankan tugas sesuai tanggung jawabnya maka keberhasilan perusahaan akan dengan mudah dicapai.

Penerapan GCG merupakan salah satu langkah penting bagi perbankan yaitu untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan, mendorong pengelolaan perusahaan yang profesional, transparan dan efisien dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, profesionalitas dan adil, sehingga dapat memenuhi kewajiban secara baik kepada pemegang saham, dewan komisaris, mitra bisnis serta *stakeholders* lainnya. Karena GCG adalah seperangkat peraturan dan upaya perbaikan sistem dan proses dalam pengelolaan organisasi dengan mengatur dan memeperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentngan (*stakeholders*), mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi.<sup>15</sup> Adapun prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* berdasarkan PBI No.4/2006 yang telah diperbarui dengan PBI No.14/2006, sebagai berikut:

##### 1. Transparansi

---

<sup>14</sup>Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/23/Pbi/2009 Tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

<sup>15</sup> Hendro & Rahardja, *Bank & Institusi*..... hlm 86

Transparansi bermakna adanya pengungkapan yang akurat dan tepat waktu tentang seluruh hal yang material atas perusahaan, termasuk kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan tata kelola perusahaan. Dalam transaksi di BPRS misalnya, pihak penjual harus memberitahu secara transparan harga barang dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahan harga dan akad *Ba'i al-murabahah* (jual beli barang dengan harga pokok plus keuntungan yang disepakati bersama).

## 2. Akuntabilitas

Praktik pengelolaan BPRS harus benar-benar dijalankan berdasarkan prinsip syariah, sehingga para praktisi BPRS sudah sewajarnya mengikuti pelatihan tentang ekonomi syariah secara berkelanjutan. Sumber daya manusia adalah faktor terpenting dalam suatu sistem lembaga keuangan syariah sehingga harus didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Dengan demikian peningkatan pendidikan dan pelatihan khususnya tentang konsep dan praktik lembaga keuangan syariah perlu senantiasa ditingkatkan untuk menghasilkan tenaga ahli lembaga keuangan syariah yang berkualitas. Dalam surat Al-baqarah ayat 282 dijelaskan:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ  
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُب ۚ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ  
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ  
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ

وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ  
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ  
 تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا ۚ إِذَا  
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ  
 بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

16

Atinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penyusundi antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penyusun enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya....(Q.S Al-baqarah: 282).

### 3. Pertanggungjawaban

Prinsip ini menekankan pada kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) BPRS, seperti karyawan, nasabah, konsumen, masyarakat, dan lingkungan sekitar, serta pemerintah selaku regulator. BPRS diharapkan selalu memelihara kesinambungan nilai tambah tersebut. Disebutkan dalam Q.S Al-Anfal ayat 27 yaitu:

<sup>16</sup> QS. Al- baqarah ayat 282

عَلَّمُونَ وَأَنْتُمْ أَمْنَتِكُمْ وَتَخُونُوا وَالرَّسُولَ اللَّهُ تَخُونُوا إِلَّا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُهَا



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

#### 4. Profesionalitas

BPRS harus mengedepankan profesionalisme dan keunggulan layanan (*service excellence*) kepada nasabah. Apabila BPRS mampu layanan prima dan profesional serta memiliki kinerja yang unggul, maka dapat dipastikan umat islam akan lebih percaya terhadap BPRS.

#### 5. Berkeadilan

BPRS perlu mewujudkan prinsip pengelolaan yang berkeadilan sosial, ekonomi, dan distribusi kekayaan. Prinsip keadilan sesungguhnya telah terlihat pada penerapan bagi hasil (*profit sharing*) untuk menggantikan bunga yang dianggap riba. Melalui sistem bagi hasil ini, pemberi modal dan peminjam menanggung bersama risiko laba atau rugi sehingga kekayaan tidak hanya beredar pada satu golongan. Artinya depositan atau penyimpan bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*, dengan dana yang dapat digunakan untuk melakukan pembiayaan akad jual beli maupun *syirkah*. Apabila terjadi kerugian, maka bank juga turut bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> QS. Anfal ayat 27

<sup>18</sup> Hendro & Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan....* hlm. 246-247

## 2.3 Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### 2.3.1 Kinerja Perusahaan

Pelaksanaan strategis bisnis dan hasil (*out come*) yang dapat diraih dalam pelaksanaan bisnis untuk mencapai tujuan operasional dan tujuan ideal/tujuan strategik sebuah organisasi/perusahaan sangat tergantung pada kinerja dan bagaimana kinerja itu dikelola oleh para pemangku kepentingan (manajemen kinerja). *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2001) merumuskan *corporate governance* sebagai suatu sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. Tujuan *cooporate* adalah menciptakan nilai tambah bagi *stakeholders*. *Corporate governance* yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan.<sup>19</sup>

Kinerja adalah kemampuan kerja dan hasil atau prestasi yang dicapai dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Stephen P. Robin mengatakan kinerja adalah jawaban atas pertanyaan “apa hasil yang dicapai seseorang sesudah mengerjakan sesuatu.” Sedangkan menurut Hunt dan Osborn mengatakan kinerja adalah kuantitas dan kuitas pencapaian tugas-tugas, baik yang dilakukan individu, kelompok maupun organisasi.<sup>20</sup> Aspek kuantitas mengacu pada beban kerja/ target kerja, sedang kualitas menyangkut kesempurnan dan kerapian pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Sedangkan dari aspek kualitas dipengaruhi oleh berat ringan atau sulit mudah atau kompleks tidaknya pekerjaan yang dilaksanakan. Ukuran kualitas terutama berkenaan dengan pekerjaan atau jabatan yang menuntut kemampuan manajerial/profesional yang memerlukan keahlian kinerja tertentu. Untuk itu kinerja dalam melaksanakan kegiatan/pekerjaan bisnis tolok ukurnya sering dikaitkan juga dengan kemampuan menyelesaikan

---

<sup>19</sup>Rahmawati, *Teori Akuntansi Keuangan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 171

<sup>20</sup>Nawawi, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja....*, hlm. 62

masalah, menciptakan dan mendesain produk, frekuensi dan mutu kreatifitas, inisiatif dan keberanian pengambilan keputusan, kemampuan mengatasi, menghindari resiko bisnis, dll.<sup>21</sup>

Dari definisi-definisi diatas dapat diketahui unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja terdiri dari:

- (1) Hasil-hasil fungsi pekerjaan
- (2) Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi karya pegawai seperti kemampuan motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan.
- (3) Pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Periode waktu tertentu.
- (5) Tidak melanggar hukum.
- (6) Sesuai dengan moral dan etika.<sup>22</sup>

Kinerja perusahaan adalah gambaran tentang kondisi kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan rasio-rasio keuangan. Jadi, laporan keuangan merupakan alat penilaian kinerja perusahaan.

### 2.3.2 Kinerja Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Perusahaan

Kinerja keuangan merupakan tolok ukur dalam menilai tingkat kesehatan bank yang dapat dilihat dari laporan keuangan. Laporan keuangan triwulan BPRS yang disampaikan kepada BI dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat kesehatan atau baik buruknya kinerja BPRS. Dalam upaya mempertahankan pertumbuhan yang berkesinambungan (*sustainable*) serta tetap menarik dimata investor, diantara upaya yang perlu dilakukan adalah senantiasa meningkatkan profitabilitas.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini profitabilitas BPRS diukur dengan Rasio *Return On Asset* (ROA). Analisis ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset

---

<sup>21</sup> Nawawi, *Evaluasi dan Manajemen Kinerja....*, hlm. 63

<sup>22</sup> Ismail Nawawi Uha, *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja (Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi) Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 213

<sup>23</sup> M. Lutfi Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi Syariah*, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003, hlm. 7

(kekayaan) yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Biaya-biaya pendanaan yang dimaksud adalah bunga yang merupakan biaya pendanaan dengan hutang. Deviden yang merupakan biaya pendanaan dengan saham dalam analisis ROA tidak diperhitungkan. Biaya bunga ditambahkan laba yang diperoleh perusahaan. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*). Analisis difokuskan pada profitabilitas aset, dan dengan demikian tidak memperhitungkan cara-cara untuk mendanai aset tersebut.<sup>24</sup> ROA digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh laba atau keuntungan secara keseluruhan. Sehingga semakin tinggi angka ROA menunjukkan semakin baik pengelolaan aset. Rumus perhitungan ROA sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba/rugi tahun berjalan}}{\text{total aset}} \times 100\%$$

Penilaian tingkat kesehatan ROA diklasifikasikan menjadi 5 (lima) peringkat<sup>25</sup>:

**Tabel 1**  
**Kriteria Penilaian Peringkat ROA**

No.	Kriteria Penilaian Peringkat	Keterangan
1	Peringkat 1, ROA > 1,450%	Sangat Tinggi
2	Peringkat 2, 1,215% < ROA ≤ 1,450%	Tinggi
3	Peringkat 3, 0,999% < ROA ≤ 1,215%	Cukup Memadai
4	Peringkat 4, 0,765% < ROA ≤ 0,999%	Rendah
5	Peringkat 5, ROA ≤ 0,765%	Sangat Rendah

<sup>24</sup>Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2000, hlm. 159

<sup>25</sup>Eriza Mayang Kusuma, *Hubungan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2011-2012*, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2014, hlm. 6

## 2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti terdahulu yang pernah melakukan penelitian tentang penerapan *Corporate Governance*, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fajar Nur Hafidzah (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index, periode 2008-2012. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keterkaitan antara pengungkapan CSR, GCG dan kinerja perusahaan. Pengungkapan CSR diukur menggunakan indeks *Corporate Disclosure Index* (CSDI), GCG diproksikan dengan kepemilikan Institusional, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, serta frekuensi rapat komite audit yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan dan kinerja perusahaan diukur menggunakan *Return On Equity* (ROE). Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2008-2012. Dan hasil penelitian ini menunjukkan: (1) *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, (2) Variabel *Good Corporate Governance* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, dan (3) GCG: kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris dan frekuensi rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan, hanya komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
2. Komang Meitradi Setyawan dan I Gusti Ayu Made Asri Dwija Putri (2013) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan *return on assets* pada LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu

metode survei dengan teknik kuesioner. Sampel yang digunakan sebanyak 35 LPD. Penentuan sampel menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan teknik sampel jenuh. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

3. Diana Prasinta (2012) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposivesampling* yaitu pemilihan sampel dengan kriteria tertentu, sehingga didapat sampel dalam penelitian ini sebanyak 31 perusahaan. Penerapan *good corporate governance* diukur dengan skor CGPI. Kinerja keuangan diukur dengan *return on assets* (ROA), *return on equity* (ROE) dan *Tobin's Q*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *return on assets*, namun terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *return on equity*, dan tidak terdapat hubungan positif antara *good corporate governance* dengan *tobin's Q*. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja operasional, namun pencapaian laba perusahaan dan respon pasar atas implementasi *good corporate governance* masih kurang.
4. Febry Setyo Nugroho (2013) meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Return On Assets* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh *good corporate governance* terhadap nilai perusahaan, (2) pengaruh *return on assets* terhadap nilai perusahaan, (3) pengaruh ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan. Selain itu juga bertujuan untuk

mengetahui pengaruh *good corporate governance*, *return on assets* dan ukuran perusahaan secara simultan terhadap nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini adalah : (1) di dapat persamaan regresi *Tobin's Q* = - 0,665 + 0,000GCG + 6,322ROA + 0,054Size + ei; (2) *good corporate governance* tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini ditunjukkan melalui besarnya signifikansi 0,950 lebih besar daripada nilai signifikansi alpha 0,05; (3) *return on assets* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini ditunjukkan melalui besarnya signifikansi 0,000 lebih kecil daripada nilai signifikansi alpha 0,05; (4) ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini ditunjukkan melalui besarnya signifikansi 0,206 lebih besar daripada nilai signifikansi alpha 0,05; (5) *good corporate governance*, *return on assets* dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, hal ini ditunjukkan melalui besarnya signifikansi 0,000 lebih kecil daripada nilai signifikansi alpha 0,05.

5. Maria Prudensiana Leda Muga (2012) meneliti tentang pengaruh struktur *Good Corporate Governance* (GCG) dan ukuran kinerja terhadap praktek manajemen laba (studi pada perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia sektor manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, audit internal dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Sampel penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang listing di BEI pada tahun 2008-2009. Penelitian ini menggunakan metode sampling dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan dan diperoleh sebanyak 36 perusahaan dengan data observasi sebanyak 72. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba (2) komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba (3) kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen

laba (4) auditor eksternal berpengaruh negatif signifikan terhadap praktek manajemen laba, dan (5) ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap praktek manajemen laba.

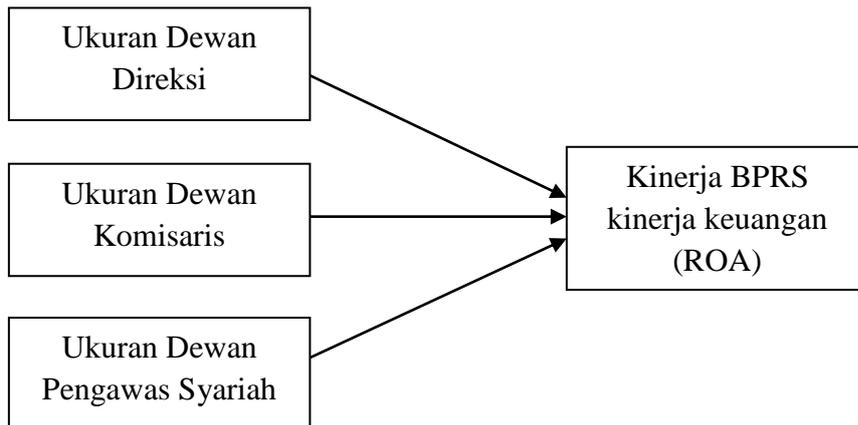
6. Lisa Desianty (2009) meneliti tentang pengaruh struktur *Good Corporate Governance* terhadap manajemen laba studi pada bank umum swasta nasional tahun 2003-2008. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh struktur *good corporate governance* yang diproksikan dengan proporsi anggota dewan komisaris dan proporsi anggota dewan komite audit berdasarkan kompetensi dan pengalaman di bidang keuangan manajemen laba. Data penelitian ini adalah *purposive* sampel bank umum swasta. Pengumpulan data berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan bank yang telah dipublikasikan disamping bank yang menjadi sampel. Data dikumpulkan dari 24 bank baik yang telah dan belum tercatat dalam bursa efek dengan cakupan data periode 2003 s.d 2008. Metode dengan analisa regresi berganda. Hasil penelitian diperoleh bukti empiris bahwa struktur GCG berupa proporsi anggota dewan komisaris independen, jumlah anggota dewan komisaris dan proporsi kompetensi dan pengalaman komite audit di bidang keuangan dan perbankan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba.

## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah adanya indikator dalam suatu perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yaitu ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris, dan ukuran Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai pengaruh terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan yang ada dalam suatu perusahaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pengukuran kinerja keuangan tersebut menggunakan alat pengukuran yaitu ROA. ROA ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. ROA yang merupakan kemampuan dari modal yang diinvestasikan ke dalam seluruh aktiva

perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Kerangka pemikiran penelitian ini yaitu:

**Gambar 1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



## 2.6 Pengembangan Hipotesis

Sejak Barle dan Means (1993) menggolongkan korporasi (*perseroan*) modern sebagai institusi yang memisahkan kepemilikan (*ownership*) dari kontrol, pertanyaan tentang bagaimana mensejajarkan kepentingan-kepentingan para pemilik, manajer dan stakeholder (pihak-pihak yang punya kepentingan dalam perusahaan) lainnya dalam entitas korporasi telah menjadi isu yang aktif. Definisi tersebut kemudian memunculkan pertanyaan lebih jauh mengenai siapakah mereka yang memunyai kepentingan dalam sebuah korporasi.<sup>26</sup> Kelompok-kelompok yang terlibat adalah mulai para pemegang saham, para dewan direktur, serta organ-organ perusahaan lain seperti dewan komisaris dan dewan pengawas syariah pada bank-bank yang menggunakan prinsip syariah.

Kepengurusan Bank Syariah terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Di samping itu, Bank Syariah wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank.<sup>27</sup>

### a. Hubungan ukuran Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan BPRS

Organ-organ penting dalam sebuah perusahaan maupun perbankan mempunyai tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya untuk memajukan perusahaan, salah satunya yaitu dewan Direksi yang mempunyai tugas utama untuk : (1) menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan operasional BPRS, (2) apabila diperlukan, direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPRS. Dalam menjalankan fungsinya, Direksi menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPRS kepada RUPS melalui Dewan Komisaris yang berisi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, pembiayaan, keuangan, umum, dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan. Serta menyusun

---

<sup>26</sup>Muhammad, *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*, Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN, 2005, hlm. 404

<sup>27</sup> Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan....*, hlm. 417

dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, Komisaris atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain. Anggota Direksi paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.<sup>28</sup>

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Keberadaan *outside directors* dalam komposisi BOD pada BPR diduga berpengaruh terhadap kinerja BPR. Dengan meningkatnya jumlah *outside directors* dalam BPR diharapkan pengawasan terhadap manajemen BPR dalam melaksanakan kebijakan perusahaan menjadi semakin kuat. Dengan monitoring yang efektif tersebut diduga dapat mengendalikan manajer untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Jika peran dan fungsi BOD dalam BPR dijalankan dengan baik, maka dapat diduga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPR, karena jumlah BOD dinilai berkaitan dengan kuat lemahnya pengawasan terhadap manajemen BPR. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional BPR sehingga dapat mempengaruhi kinerja.<sup>29</sup> Pengaruh ukuran direksi terhadap kinerja perusahaan akan tergantung dari karakteristik dari masing-masing perusahaan terkait. Kaitan tersebut terutama dengan karakteristik perusahaan secara keuangan. Efektifitas direksi dalam menghasilkan kinerja akan berbeda bagi perusahaan yang sehat secara keuangan dibandingkan dengan perusahaan yang sedang dalam masalah keuangan.<sup>30</sup> Iqbal Bukhori (2012) jika hanya terdapat satu

---

<sup>28</sup>Hendro & Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan....*, hlm. 238

<sup>29</sup>Okky Andriyan & Supatmi, *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana, 2010, hlm. 192

<sup>30</sup>Eka Hardikasari (a), *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2006-2008*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 47

orang dewan direksi, maka dewan direksi tersebut dapat dengan bebas mewakili perusahaan dalam berbagai urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Hal yang mungkin akan berbeda jika jumlah dewan direksi memiliki nominal jumlah tertentu. Jumlah dewan direksi secara logis akan sangat berpengaruh terhadap kecepatan pengambilan keputusan perusahaan. Sehingga jika jumlah direksi lebih sedikit maka akan cepat dalam mengambil keputusan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat diambil hipotesis:

H1: Ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA)

b. Hubungan ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan BPRS

Dewan komisaris bertugas untuk menetapkan berbagai kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap BPRS. Dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris berfungsi : (1) menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan BPRS, (2) mengawasi kepengurusan BPRS, (3) menetapkan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS, (4) membina dan mengembangkan BPRS.<sup>31</sup>Dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi dan memberikan petunjuk dan arahan pada pengelola perusahaan. Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen dalam penulisan laporan keuangan. Hal ini sangat penting karena mengingat adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang akhirnya akan berdampak pada kepercayaan investor.

Semakin banyaknya anggota dewan komisaris, pengawasan terhadap dewan direksi jauh lebih baik, masukan atau opsi yang akan didapat direksi akan jauh lebih banyak. Untuk itu masih diperlukan

---

<sup>31</sup> Hendro & Rahardja, *Bank & Institusi Keuangan ....*, hlm. 242

penelitian yang dapat membuktikan pengaruh ukuran dewan komisaris ini terhadap kinerja perusahaan di Indonesia.<sup>32</sup> Hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan manajemen laba positif, makin banyak anggota dewan komisaris maka makin banyak manajemen laba yang terjadi.<sup>33</sup> Makin besar ukuran dewan komisaris maka lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen daripada jumlah komisaris yang sedikit.<sup>34</sup> Hal tersebut berarti jika jumlah dewan komisaris lebih banyak maka akan memperbaiki kinerja perusahaan.

H2: Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA)

c. Hubungan ukuran Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan BPRS

Dalam menjalankan usahanya, BPRS wajib membentuk dan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bekerja di kantor pusat BPRS. Anggota DPS minimal berjumlah 1 (satu) orang dan maksimal berjumlah 3 (tiga) orang, yang diperbolehkan untuk merangkap jabatan sebagai Anggota Dewan Nasional (DSN) atau bekerja maksimal 2 (dua) di lembaga perbankan dan lembaga keuangan syariah lain non bank. Anggota DPS dimasukkan ke dalam pihak terafiliasi BPRS. Tugas, wewenang dan tanggung jawab DPS antara lain: (1) memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BPRS terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN, (2) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah minimal 6 (enam) bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, DSN, dan BI, (3) menilai

---

<sup>32</sup>Iqbal Bukhori, Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2010), Jurnal Akuntansi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2012, hlm. 4

<sup>33</sup>Eka Hardikasari (b), Pengaruh Penerapan *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2006-2008, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011, hlm. 50

<sup>34</sup>Kadek Dian Nopiani, Luh Gede Erni Sulindawati, Edi Sujana, Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Di Bali, Jurnal Akuntansi Program S1, Bali: Universitas Pendidikan Ganesha, 2015

aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BPRS.<sup>35</sup>

Operasional pelayanan perbankan syariah tidak diatur secara rinci oleh undang-undang maupun oleh peraturan yang dibuat Bank Indonesia. Pada dasarnya, bank-bank syariah di Indonesia dapat melakukan pelayanan perbankan syariah yang lazim dilaksanakan oleh bank-bank syariah di negara lain, sepanjang kegiatan tersebut mematuhi hukum-hukum syariah dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah di bank tersebut. Setiap kali bank syariah akan memperkenalkan produk pelayanan baru, bank wajib meminta fatwa dari Dewan Pengawas Syariah. Dari pernyataan diatas jelas bahwa Dewan Pengawas Syariah menjadi organ terpenting dalam dunia perbankan syariah.<sup>36</sup>

Semakin banyak jumlah Dewan Pengawas Syariah maka akan semakin efektif pengawasan terhadap prinsip syariah dan pengungkapan ISR yang sesuai dengan syariah.<sup>37</sup> Jadi, jika jumlah Dewan Pengawas Syariah semakin banyak tetapi tidak melebihi batas maksimal yang telah ditetapkan, maka kinerja BPRS berdasar prinsip syariah sehingga akan berdampak pada kepercayaan nasabah dan otomatis akan menaikkan tingkat profitabilitas BPRS.

H3: Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (ROA)

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm 244

<sup>36</sup>Hamidi, *Jejak-jejak Ekonomi* ....., hlm. 123

<sup>37</sup>Amirul Khoiruddin (a), Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 46

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sumber Data**

##### **3.1.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Menurut tingkat penjelasan penelitian ini adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasional merupakan bentuk penelitian untuk memeriksa hubungan diantara dua konsep.<sup>1</sup>

##### **1.1.2 Jenis Data**

Menurut waktu pengumpulannya penelitian ini menggunakan data *Cross Section*. Data *Cross Section* adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Sedangkan menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan data kuantitatif yaitu sumber data berupa angka yang distatistikkan, kemudian angka dianalisis dengan dua variabel, yaitu *good corporate governance* sebagai variabel independen (bebas) dan kinerja perusahaan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai variabel dependen (terikat).

##### **1.1.3 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diteliti oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau

---

<sup>1</sup>Dream's Zone," Jenis-jenis Metode Penelitian Beserta Contohnya, <http://penjual-mimpi.blogspot.co.id/2014/09/jenis-jenis-metode-penelitian-beserta.html?m=1>, diakses 18 Desember 2015

data laporan yang telah tersedia.<sup>2</sup>Data sekunder diperoleh dari buku referensi, internet, literatur, jurnal dan data-data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data-data diambil dari laporan keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang sudah dipublikasikan di statistik BI dan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2013-2014. Data yang dianalisis adalah data laporan keuangan periode Desember berupa laporan neraca dan laba-rugi BPRS tahun 2013 sampai 2014

## 3.2 Populasi dan Sampel

### 3.2.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BPRS yang beroperasi selama periode 2013-2014 dan telah mempublikasikan laporan keuangannya di *website* Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

### 3.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode nonprobabilitas (secara tidak acak) berdasarkan kriteria (*purposive sampling*). *Purposive Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dapat berdasarkan pertimbangan (*judgment*) tertentu atau jatah (*quota*) tertentu.<sup>3</sup> Adapun kriteria yang menjadi sampel adalah: (1) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangannya di *website* Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, (2) Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia pada publikasi periode 2013-2014), baik data mengenai kepengurusan perusahaan maupun

---

<sup>2</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998, hlm. 91

<sup>3</sup>Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013, hlm. 152

data yang diperlukan untuk mendeteksi kinerja keuangan. Hasil di atas dapat dilihat pada tabel 3 berikut:

**Tabel 1**  
**Perolehan sampel penelitian**

Jumlah BPRS yang terdapat di Jawa Tengah	25
BPRS yang tidak memenuhi kriteria	1
Total BPRS	24
Total Sampel (jumlah BPRS x dua tahun)	48

Sumber: data diolah 2015

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diambil berdasarkan teknik dokumentasi yaitu dengan cara membaca, mencatat, mengamati, dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan materi penelitian serta mengunduh dat-data dan informasi melalui situs internet dan website Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan laporan keuangan BPRS di Jawa Tengah tahun 2013-2014.

### 3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini ukuran Dewan Direksi, ukuran Dewan Komisaris dan ukuran Dewan Pengawas Syariah sebagai variabel independen. Dari ketiga elemen tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang sangat penting untuk kelangsungan hidup perbankan. Sedangkan kinerja keuangan sebagai variabel dependen diproksikan dengan ROA (*Return On Asset*). Dimana ROA menggambarkan tingkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki.

#### 3.4.1 Ukuran Dewan Direksi

Persyaratan kepengurusan suatu BPRS ialah mengenai jumlah Dewan Direksi BPRS. Menurut Pasal 23 ayat (1), Direksi BPRS sekurang-kurangnya harus berjumlah 2 (dua) orang<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 1999, hlm. 162

Framudyo Jati (2009) Komposisi dewan direksi sering digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan kolusi dan dominasi direksi. Jumlah dewan direksi yang besar kurang efektif dalam memonitor manajemen. Direksi sangat berpengaruh diperusahaan karena dewan direksi adalah eksekutor dalam perusahaan. Skala pengukuran variabel ini adalah skala nominal yaitu dengan menggunakan indikator ukuran dewan direksi yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan direksi yang dimiliki perusahaan perbankan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **3.4.2 Ukuran Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris yaitu dewan yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direktur perusahaan. Skala pengukuran variabel ini adalah skala nominal yaitu dengan menggunakan indikator ukuran dewan komisaris yang diukur dengan cara menghitung jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki perusahaan perbankan yang disebutkan dalam laporan tahunan perusahaan.

#### **3.4.3 Ukuran Dewan Pengawas Syariah**

Menurut ketentuan Pasal 19 SK DIR BI 31/36/1999, kepengurusan BPRS terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi. Disamping kepengurusan, suatu BRPS wajib pula memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi mengawasi kegiatan BUS tersebut.<sup>5</sup> Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan penyempurnaan SE BI No. 8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan Bank

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 162

Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disebut DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) agar sesuai dengan Prinsip Syariah.<sup>6</sup> Pasal 20 ayat (1) menentukan Dewan Pengawas Syariah berfungsi mengawasi kegiatan usaha BPRS agar sesuai dengan prinsip Syariah. Menurut Pasal 20 ayat (2) dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Pengawas Syri'ah wajib mengikuti fatwa Dewan Syariah Nasional.<sup>7</sup> Dewan Pengawas Syariah diukur dengan menggunakan jumlah anggota dalam suatu perusahaan perbankan.

#### **3.4.4 Return On Asset (ROA)**

Laporan keuangan menjadi patokan untuk mengukur bagaimana kinerja suatu perusahaan itu dikatakan baik. ROA menggambarkan sejauh mana tingkat pengembalian dari seluruh *asset* yang dimiliki perusahaan. Febry Setyo Nugroho (2013) *Return On Assets* (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. *Assets* atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Skala pengukuran variabel ini adalah skala rasio yaitu

---

<sup>6</sup>Lihat Suratedaran Bank Indonesia Nomor 15/22/Dpbs

<sup>7</sup>Sjahdeini, *Perbankan Islam dalam....*hlm. 167

dengan menggunakan indikator prosentase jumlah pengembalian aset yang diukur dengan cara menghitung jumlah laba sebelum pajak dibagi dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan perbankan dalam laporan keuangan.

**Tabel 2**  
**Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel**

No	Variabel	Definisi Operasional	Indikator Pengukuran Variabel	Pengukuran Skala
1	Variabel Dependen (Y): Kinerja Perusahaan (ROA)	Laporan tingkat pengembalian aset menggunakan pembagian laba setelah pajak dengan total aktiva	Prosentase pengembalian seluruh aset	Rasio
2	Variabel independen (X): X1; Ukuran Dewan Direksi	Jumlah anggota Dewan Direksi dalam suatu perusahaan	Jumlah seluruh anggota Dewan Direksi dalam suatu perusahaan	Nominal
	X2; Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan	Jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris dalam suatu perusahaan	Nominal
	X3; Ukuran Dewan Pengawas Syariah	Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan	Jumlah seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah dalam suatu perusahaan	Nominal

Sumber: Data diolah 2015

### 3.5 Teknik Analisis Data

Pengujian Hipotesis pengaruh penerapan *good corporate governance* terhadap kinerja perusahaan (H1, H2, dan H3) digunakan alat analisis regresi linier berganda dengan bantuan program komputer *SPSS 16.00 for Windows*. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$\text{ROA} = a + b_1\text{DD} + b_2\text{DK} + b_3\text{DPS} + e$$

Keterangan:

ROA	= Kinerja Perusahaan
a	= Konstanta
b <sub>1</sub> DD	= Ukuran Dewan Direksi
b <sub>2</sub> DK	= Ukuran Dewan Komisaris
b <sub>3</sub> DPS	= Ukuran Dewan Pengawas Syariah
e	= error

Metode analisis data dalam penelitian ini terdiri dari analisis deskriptif dan analisis inferensial.

### 3.5.1 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif adalah dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan dianalisis. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimum dan standar deviasi dari variabel-variabel yang diteliti.

### 3.5.2 Analisis Inferensial

#### 3.5.2.1 Uji Asumsi Klasik

##### a. Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk mengetahui apakah variabel dependen dan variabel independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak.<sup>8</sup> Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan pengujian *analisis grafik*. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Dasar pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola

---

<sup>8</sup>Husein Umar, *Desain Penelitian MSDM dan perilaku karyawan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 77

distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

#### **b. Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi suatu korelasi diantara variabel-variabel bebasnya. Jika terjadi korelasi kuat, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi.<sup>9</sup> Uji multikolinieritas dapat dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance value* tiap-tiap variabel independen. Untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai  $\text{tolerance} \leq 0.10$  atau sama dengan nilai  $\text{VIF} \geq 10$ .

#### **c. Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika residual pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas.<sup>10</sup> Framudyo Jati (2009) model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Scatterplot. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

---

<sup>9</sup>Umar, *Desain Penelitian MSDM* ..... hlm. 80

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm. 82

### 3.5.2.2 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan pada beberapa tahap, sebagai berikut:

#### a. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter ( $b_1$ ) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_1 = 0$$

Artinya apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya ( $H_a$ ), parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_a : b_1 \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.<sup>11</sup>

Amirul Khoiruddin (2013) dalam Ghozali (2011:98) Penentuan nilai kritis dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi dapat ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dengan memperhatikan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) dan banyaknya sampel yang digunakan. Penentuan t tabel dalam penelitian ini menggunakan *degree of freedom* atau  $df = n - k - 1$  dan  $\alpha = 0.05$ , n adalah banyaknya sampel, k adalah jumlah variabel.

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1)  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak apabila  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , artinya faktor tersebut secara parsial tidak mempengaruhi secara signifikan.
- 2)  $H_0$  ditolak dan diterima  $H_a$  apabila  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , artinya faktor tersebut secara parsial mempengaruhi secara signifikan.

#### b. Uji Signifikansi Simultan (F Test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-

---

<sup>11</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2001, hlm. 97

sama terhadap variabel terikat. Hipotesis nol ( $H_0$ ) yang hendak diuji adalah apakah semua parameter dalam model sama dengan nol, atau:

$$H_0: b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$$

Artinya, apakah semua variabel bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatif ( $H_a$ ), tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol, atau:

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Artinya, semua variabel independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.<sup>12</sup>Pengambilan keputusan:

1) Tolak  $H_0$

jika angka signifikan lebih kecil dari  $\alpha = 0,05$  atau 5%.

2) Terima  $H_0$

jika angka signifikan lebih besar dari  $\alpha = 0,05$  atau 5%.

3) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel, yaitu:

$H_0$  diterima jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  atau  $sig > 5\%$ .

$H_a$  diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan  $sig < 5\%$ .

### c. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah diantara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.<sup>13</sup>Koefisien determinasi dalam penelitian ini digunakan

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 98

<sup>13</sup>Amirul Khoiruddin (b), Pengaruh Elemen *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah Di Indonesia, Skripsi, Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2013, hlm. 70

untuk mengetahui besarnya presentase (%) pengaruh variabel bebas Ukuran Dewan direksi (DD), Ukuran Dewan Komisaris (DK) dan Ukuran Dewan Pengawas Syariah (DPS).

**BAB IV**  
**ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Deskripsi Obyek Penelitian**

Obyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang berada di Jawa Tengah. Propinsi Jawa Tengah merupakan daerah yang startegis untuk mendirikan lembaga keuangan karena usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sangat banyak sehingga dibutuhkan bantuan pinjaman dana untuk dijadikan modal usaha. Kerjasama antara pelaku UMKM dengan BPRS saling menguntungkan.

Terdapat 25 BPRS yang berada di Jawa Tengah dan menyebar di beberapa kabupaten yaitu Grobogan, Pati, Kudus, Semarang, Banyumas, Cilacap, Kebumen, Klaten, Magelang, Purbalingga, Sragen, Sukoharjo dan Surakarta. Penelitian ini untuk menguji bagaimana hubungan antara dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah dengan kinerja keuangan BPRS. Periode tahun yang digunakan adalah tahun 2013-2014. Selama periode tersebut diambil sampel BPRS yang memenuhi kriteria sebanyak 24. Berikut ini adalah nama-nama BPRS sampel yang menjadi obyek penelitian:

**Tabel 1**  
**Daftar Nama dan Alamat BPRS Sampel**

<b>No.</b>	<b>NAMA BPRS</b>	<b>ALAMAT</b>
1	IkhsanulAmal	Jl. Yos Sudarso Barat No.8a, Gombong-Kebumen
2	Ben SalamahAbadi	Jl. Ahmad Yani No.35, Purwodadi, Grobogan
3	AsadAlif	Jl. Sudagaran NO. 20, Sukorejo
4	BuanaMitraPerwira	Jl.Mt.Haryono No.267 Purbalingga
5	Artha Surya Barokah	Jl. SingosariTimur No. 1A, Semarang
6	Suriyah	Jl. DI Panjaitan No. 47A DonanCilacap 53222

7	Bina Amanah Satria	Jl. Pramuka No.219, Purwokerto, Banyumas
8	Khasanah Ummat	Jl. Sunan Bonang No.27, Tambak Sari, Kembaran
9	Artha Mas Abadi	Jl. Raya Pati - Tayu KM 19, Ds. Haturoyo, Margoyos
10	PNM Binama	Komplek Ruko Anda Kav.3 Jl. Tlogosari Raya No.1
11	Arta Leksana	Ruko No. 7, Pasar Wangon
12	Bumi Artha Sampang	Jl. Tugu No. 39, Sampang
13	Artha Amanah Ummat	Jl. HOS Cokroaminoto
14	Dana Mulia	Jl. KH. Agus Salim No.10 Kelurahan Sondakan
15	Sukowati Sragen	Jl. raya Sukowati No. 348, Sragen Wetan, Sragen
16	Dana Amanah	Jl. KH. Agus Salim No.18 Laweyan
17	Central Syariah Utama	Jl. Gatot Subroto No. 192, Kratonan, Kec. Serengan
18	Al Maburr	Jl. Raya Klaten-Solo Km.4, Klaten 57436
19	Meru Sankara	Jl. Pemuda No.95 B Muntilan Magelang Jawa Tengah
20	Gunung Slamet	Jl. Gatot Subroto No.91
21	Mitra Harmoni Kota Semarang	Jl. Majapahit No.170 B Gayamsari
22	Insan Madani	jl. Raya Pabelan No.368, Kartasura, Sukoharjo
23	Dharma Kuwera	Jl. Sersan Sadikin, Girimulyo, Gergunung, Klaten
24	Saka Dana Mulia	Jl. Raya Kudus - Colo Km 9 Dawe

Sumber: data dari Bank Indonesia

#### 4.2 Hasil Analisis Data dan Uji Hipotesis

Selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bank pembiayaan rakyat syariah yang diambil dalam penelitian ini tercatat sebanyak 24 BPRS di Jawa Tengah yang telah memenuhi syarat kriteria sampel. Karena penelitian ini mengambil sampel dengan metode *purposive sampling*, artinya sampel diambil dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu. Dimana BPRS yang terdaftar dalam Bank Indonesia dan mempublikasikan laporan keuangannya selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.

Hasil penelitian ini berupa informasi untuk menguji apakah ukuran dari masing-masing elemen GCG akan mempengaruhi kinerja keuangan perbankan sehingga akan mempengaruhi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Sesuai dengan penjelasan permasalahan dan metode yang telah dikemukakan,serta untuk kepentingan pengujian hipotesis makateknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik melalui program *SPSS 16.0*.

#### 4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil statistik deskriptif pada variabel kinerja keuangan, ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014.

**Tabel 2**  
**Hasil Analisis Deskriptif Rata-rata ROA dan Elemen GCG**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ROA (Y)	48	-25.60	7.46	.6129	4.70353
DD (X1)	48	1	3	1.85	.583
DK (X2)	48	2	3	2.23	.425
DPS (X3)	48	1	3	2.06	.598
Valid N (listwise)	48				

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel diatas didapatkan bahwa ROA memiliki nilai minimum sebesar -25,60 yang berarti bahwa nilai terendah yang ada dalam data sampel yang dianalisis adalah -25,60. Kemudian nilai maximum sebesar 7,46 berarti bahwa nilai tertinggi dari data yang dianalisis adalah sebesar 7,46. Nilai mean sebesar 0,613 berarti bahwa nilai rata-rata data ROA yang dianalisis adalah sebesar 0,613. Nilai standar deviasi atau simpangan baku sebesar 4,70 jauh lebih besar dari

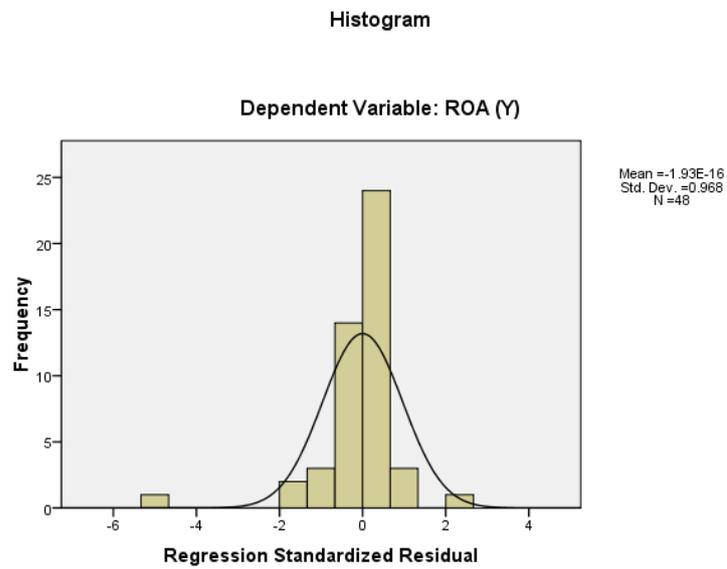
nilai rata-rata dan berarti bahwa tingkat penyimpangan datanya besar. Ukuran Dewan Direksi pada BPRS sampel mempunyai rata-rata sebesar 1,85 (dibulatkan menjadi 2). Nilai terendah sebesar 1 dan nilai tertinggi sebesar 3. Standar deviasi atau simpangan baku sebesar 0,58 yang berarti bahwa tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil. Ukuran Dewan Komisaris pada BPRS sampel mempunyai rata-rata sebesar 2,23 (dibulatkan menjadi 2). Nilai terendah sebesar 2 dan nilai tertinggi sebesar 3. Standar deviasi atau simpangan baku sebesar 0,42 yang berarti bahwa tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil. Dan pada Ukuran Dewan Pengawas Syariah pada BPRS sampel mempunyai rata-rata sebesar 2,06 (dibulatkan menjadi 2). Nilai terendah sebesar 1 dan nilai tertinggi sebesar 3. Standar deviasi atau simpangan baku sebesar 0,60 yang berarti bahwa tingkat penyimpangan datanya cenderung kecil.

#### **4.2.2 Uji Asumsi Klasik**

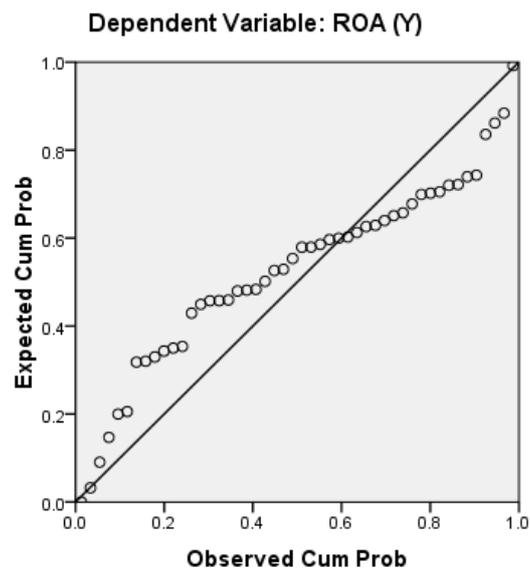
##### **4.2.2.1 Uji Normalitas**

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas memiliki distribusi data normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal. Penelitian ini dalam melakukan uji normalitas menggunakan *analisis Grafik*. Dalam tabel 7 berikut disajikan hasil dari *analisis Grafik*.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Dari grafik histogram tampak bahwa residual terdistribusi secara normal dan berbentuk simetris tidak menceng ke kanan atau ke kiri. Pada grafik normal probability plots titik-titik menyebar berhimpit disekitar diagonal dan hal ini menunjukkan bahwa residual terdistribusi secara normal.

#### 4.2.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel bebas (*independent*). Model regresi yang baik adalah tidak terdapat korelasi diantara variabel-variabel bebasnya. Uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance value* tiap-tiap variabel independen. Pada tabel 8 berikut disajikan hasil uji nilai *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan *tolerance value*.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-14.438	4.544		-3.177	.003		
	DD (X1)	3.233	1.088	.401	2.971	.005	.923	1.084
	DK (X2)	.948	1.444	.086	.657	.515	.988	1.012
	DPS (X3)	3.366	1.067	.428	3.155	.003	.912	1.096

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 8, hasil nilai VIF ukuran dewan direksi (DD) sebesar 1.084 dengan nilai tolerance sebesar 0.005. Dan

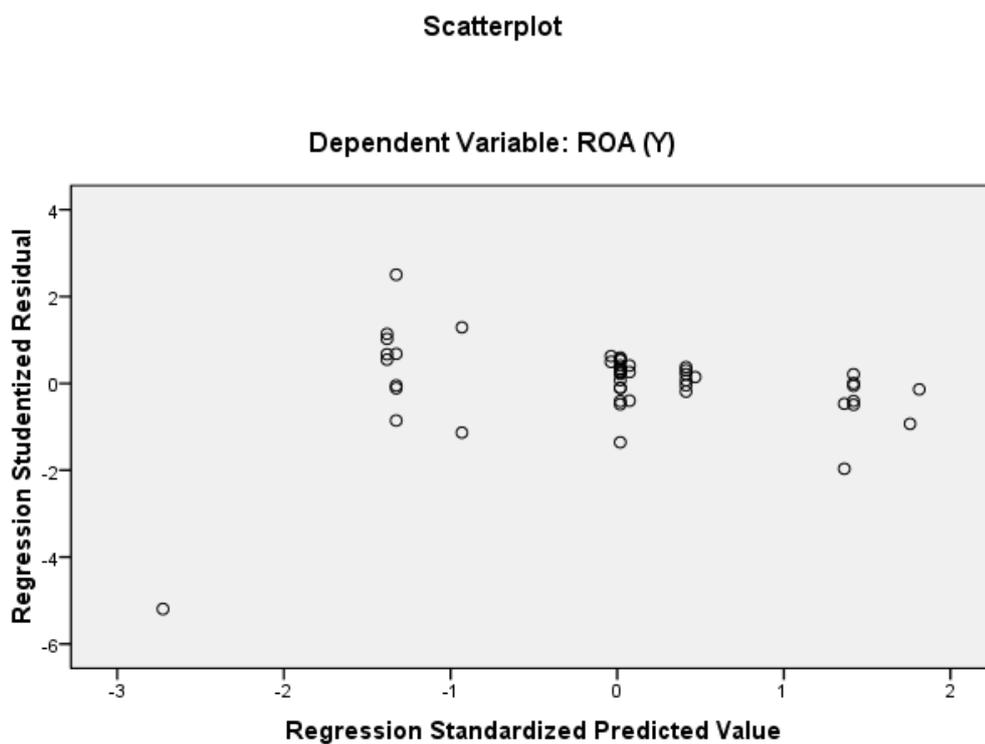
pada variabel dewan pengawas syariah (DPS) mempunyai nilai VIF 1.096 dengan nilai tolerance sebesar 0.003. Sehingga kedua variabel ini tidak terjadi multikolinieritas..

Sedangkan pada variabel ukuran dewan komisaris (DK) nilai VIF tidak lebih dari 10 tetapi nilai tolerance diatas 0.10 yaitu 0.515. Sehingga variabel dewan komisaris (DK) terjadi multikolinieritas.

#### **4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan kepengamatan lain. Jika residual pengamatan kepengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Scatterplot*. Pada tabel 9 berikut disajikan hasil uji *Scatterplots*.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**



Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Tabel 9 menunjukkan grafik *scatterplots* terlihat titik-titik menyebar secara acak (random) baik diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja keuangan (ROA) berdasarkan masukan variabel independen ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah.

### 4.2.3 Uji Hipotesis

#### 4.2.3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Maka digunakan uji t, dimana  $df = n - k = 48 - 3 - 1 = 44$ , maka  $t \text{ tabel} = 2.0154$

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14.438	4.544		-3.177	.003
	DD (X1)	3.233	1.088	.401	2.971	.005
	DK (X2)	.948	1.444	.086	.657	.515
	DPS (X3)	3.366	1.067	.428	3.155	.003

a. Dependent Variable: ROA (Y)

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Berdasarkan tabel 10 dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis dari variabel independen terhadap variabel dependen adalah nilai t hitung untuk variabel ukuran dewan direksi (DD) terhadap ROA menunjukkan 2.971, berarti  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  ( $2.971 > 2.0154$ ), artinya  $H_0$  ditolak dan diterima  $H_a$ , dengan tingkat signifikansi 0,005. Tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05, maka DD secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Pada variabel DK nilai t hitung sebesar 0.657 yang berarti  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  artinya  $H_0$  diterima dan ditolak  $H_a$ . Dan tingkat signifikansi 0,515 karena tingkat signifikansi lebih besar

dari pada 0,05, maka DK secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.

Sedangkan pada variabel DPS nilai t hitung sebesar 3.155 yang berarti  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  artinya  $H_0$  ditolak dan diterima  $H_a$ . Dan tingkat signifikansi 0,003 karena tingkat signifikansi lebih kecil dari pada 0,05, maka DPS secara parsial berpengaruh signifikan terhadap ROA.

#### 4.2.3.2 Uji Signifikansi Simultan (F Test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat.

**Tabel 7**

#### Hasil Uji Signifikansi Simultan

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	271.769	3	90.590	5.190	.004 <sup>a</sup>
	Residual	768.020	44	17.455		
	Total	1039.789	47			

a. Predictors: (Constant), DPS (X3), DK (X2), DD (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Hasil uji F pada tabel menunjukkan bahwa F hitung yaitu sebesar 5,190 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 (< 0,05). Jadi dapat disimpulkan bahwa *good corporate governance* yang diprosikan dengan ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah secara bersama-sama (simultan)

berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS yang diproksikan dengan ROA.

#### 4.2.3.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. Pada tabel 12 dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 <sup>a</sup>	.261	.211	4.17792

a. Predictors: (Constant), DPS (X3), DK (X2), DD (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

Sumber: Data Sekunder yang telah diolah

Berdasarkan output SPSS versi 16.0 diperoleh angka  $R^2$  (Adjusted R Square) sebesar 0.211 atau (21,1%) hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel independen (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah) terhadap variabel dependen (ROA) sebesar 21,1%, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah) mampu menjelaskan sebesar 21,1% variasi variabel dependen (ROA). Sedangkan sisanya sebesar 78,9% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

### 4.3 Pembahasan

Penelitian ini mengenai pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014, mendapatkan hasil sebagai berikut:

#### 4.3.1 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Bedasarkan hasil uji statistik menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,971 dengan nilai probabilitas (Sig-t) sebesar 0.005 yang nilainya dibawah level signifikan 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis nol berhasil ditolak atau dapat dinyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014. Sehingga hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014 **diterima**.

Hasil ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di BEI oleh Iqbal Bukhori (2012) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Dewan direksi berperan penting dalam kinerja keuangan BPRS yaitu dengan monitoring yang efektif diduga dapat mengendalikan manajer untuk tidak melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Jika peran dan fungsi direksi dalam BPRS dijalankan dengan baik, maka dapat diduga pihak manajemen akan lebih berhati-hati dalam pelaksanaan kegiatan operasional BPRS, karena jumlah direksi dinilai berkaitan dengan kuat lemahnya pengawasan terhadap manajemen BPRS. Hal ini dapat mengurangi potensi kerugian akibat resiko operasional BPRS sehingga dapat mempengaruhi kinerja.

#### 4.3.2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan tabel 10 ukuran dewan komisaris mempunyai nilai t hitung sebesar 0,657 dengan signifikansi 0,515. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis nol tidak berhasil ditolak atau dapat dinyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014. Sehingga hipotesis kedua (H2) yang menyatakan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014 **ditolak**.

Hasil ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan pada perusahaan BUMN yang tercatat di BEI oleh Riyanto (2007) yang menunjukkan hasil bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Setiap perusahaan dibutuhkan manajemen internal yang baik untuk kepentingan dan tujuan perusahaan. Peran dari elemen-elemen internal sangat membantu. Apalagi elemen dewan komisaris yang memegang jabatan tinggi dalam perusahaan. Personil atau jumlah anggota dewan komisaris yang semakin banyak maka lebih mampu mengurangi indikasi kinerja manajemen dari pada jumlah komisaris yang sedikit. Purno (2013) mengungkapkan bahwa ada kemungkinan proses pemilihan dewan komisaris yang kurang demokratis dimana kandidat dewan komisaris sering dipilih oleh manajemen sehingga setelah terpilih tidak berani memberi kritik terhadap manajemen. Hal itu mengakibatkan pengawasan yang dilakukan dewan komisaris tidak obyektif dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen.

Untuk kasus penelitian yang dilakukan peneliti saat ini, arah hubungan positif tetapi tidak mempengaruhi antara ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan sebagai hasil penelitian ini dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor eksternal diantaranya jumlah atau ukuran dewan komisaris BPRS telah ditentukan

oleh Bank Indonesia dan walaupun ada yang melebihi jumlah tersebut maka itu dikarenakan seseorang dalam BPRS yang bersangkutan adalah orang yang berjasa besar dalam kemajuan BPRS tersebut sehingga tetap dipertahankan. Sedangkan faktor internalnya adalah dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan dan hanya bertugas mengawasi dewan direksi sehingga dewan komisaris tidak mempunyai campur tangan dominan dalam hal keuangan. Selain itu masyarakat sebagai nasabah yang akhirnya berimbas pada pendapatan serta laba BPRS tidak memperdulikan siapa dan berapa jumlah anggota dewan komisaris, sehingga ukuran dewan komisaris tidak mempunyai efek bagi kinerja keuangan BPRS.

#### **4.3.3 Pengaruh Ukuran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)**

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan t hitung sebesar 3,155 dengan nilai probabilitas (Sig-t) 0,003 yang nilainya dibawah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Hipotesis nol berhasil ditolak atau dapat dinyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan (ROA) BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014. Sehingga hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh secara positif signifikan terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014 **diterima**.

Hasil ini sesuai dengan penelitian pada perbankan syariah di Jakarta (Dewi Magasari 2010) yang menunjukkan hasil bahwa dewan [engawas syariah tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang berbasis syariah yang secara keseluruhan menerapkan prinsip-prinsip islam. Dewasa ini masyarakat mulai tertarik dan mempercayai bank yang berbasis syariah, sehingga bagi BPRS harus benar-benar mengaplikasikan sistem syariah dalam setiap transaksi maupun

produknya. Oleh karena itu, peran dewan pengawas syariah menjadi sangat dominan bagi operasional BPRS untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat sehingga akan menambah jumlah nasabah dan otomatis jumlah pendapatan serta laba BPRS.

#### **4.3.4 Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Keuangan (ROA)**

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung yaitu sebesar 5,190 dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 ( $<0,05$ ). Jadi dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan ukuran dewan pengawas syariah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS yang diproksikan dengan ROA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan BPRS di Jawa Tengah tahun 2013-2014 dimana jumlah sampel yang diteliti terdapat 48 yang menjadi target penelitian, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014, yang ditunjukkan arah nilai koefisien regresi pada variabel ukuran dewan direksi yang bernilai positif (3.233) dengan perolehan nilai signifikan sebesar 0.005. Variabel ukuran dewan direksi memiliki nilai rata-rata 2 dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 3.
2. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014, yang ditunjukkan arah nilai koefisien regresi pada variabel ukuran dewan komisaris yang bernilai positif (0.948) dengan perolehan nilai signifikan sebesar 0.515. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai rata-rata 2 dengan nilai minimum 2 dan nilai maksimum 3.
3. Ukuran dewan pengawas syariah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan BPRS Jawa Tengah tahun 2013-2014, yang ditunjukkan arah nilai koefisien regresi pada variabel ukuran dewan komisaris yang bernilai positif (3.366) dengan perolehan nilai signifikan sebesar 0.003. Variabel ukuran dewan pengawas syariah memiliki nilai rata-rata 2 dengan nilai minimum 1 dan nilai maksimum 3.

4. Dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah yang secara simultan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Tengah tahun 2013-2014.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat disarankan sebagai berikut:

1. Bagi BPRS

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi BPRS dalam mengambil keputusan manajemen terkait jumlah personil/ukuran beberapa elemen dalam BPRS.

2. Saran Teoritis

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini masih sedikit. Sehingga disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel-variabel independen lain yang secara teoritis berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Saran yang dapat peneliti berikan untuk penelitian selanjutnya yaitu:

- Penelitian selanjutnya agar menggunakan variabel yang lebih banyak dan berbeda serta periode penelitian yang lebih panjang untuk dapat mengetahui efek pengaruh dewan direksi, dewan komisaris dan dewan pengawas syariah terhadap kinerja keuangan.
- Memperluas kriteria sampel dengan menggunakan BPRS-BPRS dengan jumlah aset tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dipetik Oktober Selasa, 2015, dari [Http://www.iicg.org/agenda-iicg/21-corporate-governance-perception-index](http://www.iicg.org/agenda-iicg/21-corporate-governance-perception-index)
- Andriyan, O., & Supatmi. (2010). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia* , 192.
- Anshori, A. G. (2007). *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ardana, & Agoes. (2011). *Etika Bisnis dan Profesi (Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya) Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Azwar, S. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bukhori, I. (2012). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei 2010). *Jurnal Akuntansi* , 4.
- Darmawan, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- edogawa, s. (t.thn.). Dipetik Oktober Jum'at, 2015, dari <http://susantodogawa.blogspot.co.id/2013/05/gcg-menurut-perspektif-islam.html>
- Fidelis Arastyo Andono, G. C. (2013). Pengaruh Penerapan Corporate Governanace Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Hasil Survei The Indonesian Institute Perception Governance (IICG). *Jurnal Ilmiah* , 5.
- Hamidi, M. L. (2003). *Jejak-jejak Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Hardikasari, E. (2011). Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Industri Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2006-2008. *Skripsi* , 47.
- Hendro, T., & Candra, C. (2014). *Bank & Institusi Keuangan Non Bank di Indonesia*. Yogyakarta: UUP STIM YKPN.
- IKAPI, A. (2011). *Kitab Undang-undang Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Fokus Media.

- Khoiruddin, A. (2013). Pengaruh Elemen Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Skripsi* , 46.
- Kuncoro, M. (2001). *Metode Kuantitatif Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Kusuma, E. M. (2014). Hubungan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Tahun 2011-2012. *Skripsi* , 6.
- M. Hanafi, M., & Halim, A. (2000). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah, Edisi Revisi*. Yogyakarta: (UPP) AMPYKPN.
- Nadzaratuzzaman, M. (2012). *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Nawawi, H. (2006). *Evaluasi dan Manajemen Kinerja di Lingkungan Perusahaan dan Industri*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nopiani, K. D., Erni, L. G., & Sujana, E. (2015). , Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Perkreditan Rakyat Di Bali. *Jurnal Akuntansi Program S1* .
- Rahmawati. (2012). *Teori Akuntansi Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ristifani. (2009). Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Dan Hubungannya Terhadap Kinerja PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. *Skripsi* .
- Rukmana, A. M. (2010). *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*. Jakarta: Erlangga.
- Sjahdeini, S. R. (1999). *Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Sumitro, W. (2004). *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tangkisan, H. N. *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Balairung & Co.

Uha, I. N. (2013). *Budaya Organisasi Kepemimpinan & Kinerja (Proses Terbentuk, Tumbuh Kembang, Dinamika, dan Kinerja Organisasi) Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana.

Umar, H. (2010). *Desain Penelitian MSDM dan perilaku karyawan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Warno. (2012). *Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah 1*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Zone, D. (2014, September). Dipetik Desember Jum'at, 2015, dari " Jenis-jenis Metode Penelitian Beserta Contohnya": <http://penjual-mimpi.blogspot.cp.id/2014/09/jenis-jenis-metode-penelitian-beserta.html?m=1>

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

[www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Hukum Online.com

**DATA PENELITIAN****Lampiran 1****Prosentase Kinerja BPRS Tahun 2013-2014**

<b>No.</b>	<b>Nama Bank</b>	<b>Tahun</b>	<b>ROA</b>	<b>DD</b>	<b>DK</b>	<b>DPS</b>
1	IkhsanulAmal	2013	-0,532%	2	2	1
		2014	-0,033%	2	2	1
2	Ben SalamahAbadi	2013	- 25,627%	1	2	1
		2014	7,458%	1	2	2
3	AsadAlif	2013	2,300%	1	3	3
		2014	3,364%	1	3	2
4	BuanaMitraPerwira	2013	2,408%	1	2	3
		2014	2,072%	2	2	3
5	Artha Surya Barokah	2013	4,438%	2	3	3
		2014	4,044%	2	2	3
6	Suriyah	2013	1,825%	2	2	1
		2014	2,053%	3	2	2
7	BinaAmanahSatria	2013	2,414%	2	2	3
		2014	2,033%	2	2	2
8	KhasanahUmmat	2013	1,322%	3	3	2
		2014	-3,840%	3	2	2
9	Artha Mas Abadi	2013	3,810%	2	2	3
		2014	4,860%	2	2	3
10	PNM Binama	2013	0,863%	2	3	2
		2014	1,427%	2	3	2
11	ArtaLeksana	2013	2,00%	2	2	2
		2014	2,346%	2	2	2
12	BumiArthaSampang	2013	2,453%	3	2	1
		2014	2,963%	3	2	1
13	ArthaAmanahUmmat	2013	2,905%	2	2	2
		2014	2,867%	2	2	2
14	Dana Mulia	2013	1,737%	2	2	2
		2014	-6,013%	1	2	2
15	SukowatiSragen	2013	3,095%	2	3	2
		2014	2,796%	2	3	2
16	Dana Amanah	2013	-1,025%	2	2	2
		2014	0,145%	1	2	2
17	Central SyariahUtama	2013	-6,005%	1	3	2
		2014	-3,018%	1	2	2
18	Al Maburr	2013	2,442%	2	3	2

		2014	1,876%	2	3	2
19	Meru Sankara	2013	1,811%	1	2	3
		2014	-0,778%	1	2	3
20	GunungSlamet	2013	1,712%	2	2	2
		2014	1,556%	2	2	2
21	Mitra Harmoni Kota Semarang	2013	0,225%	2	2	2
		2014	0,960%	2	2	2
22	InsanMadani	2013	3,105%	2	2	2
		2014	1,372%	2	2	1
23	Dharma Kuwera	2013	0,212%	2	2	2
		2014	-2,766%	1	2	2
24	Saka Dana Mulia	2013	-4,926%	2	2	2
		2014	-1,315%	2	2	2

Sumber: data diolah 2016

## STATISTIK DESKRIPTIF

### Lampiran 2

#### Uji Statistik Deskriptif variabel ROA, DD, DK, DPS

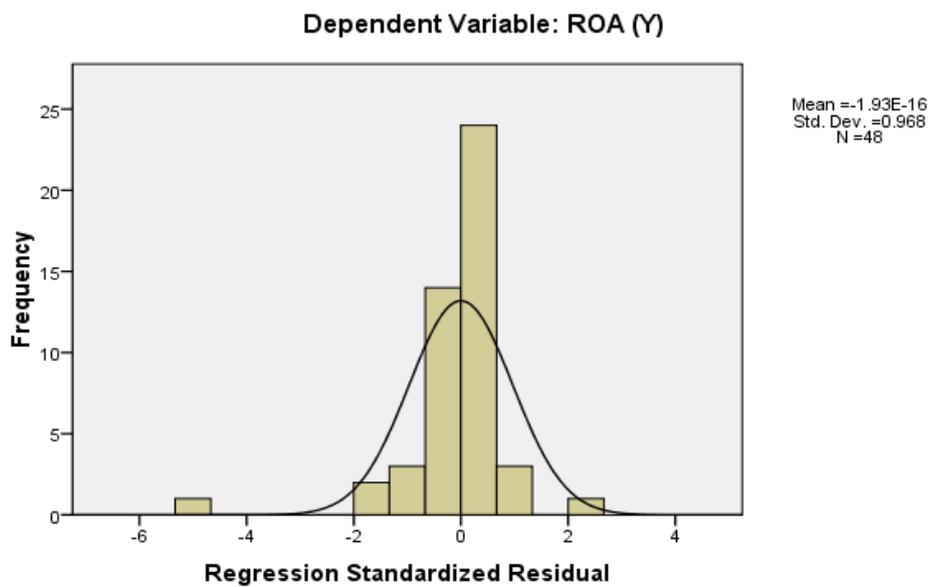
##### Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
ROA (Y)	.6129	4.70353	48
DD (X1)	1.85	.583	48
DK (X2)	2.23	.425	48
DPS (X3)	2.06	.598	48

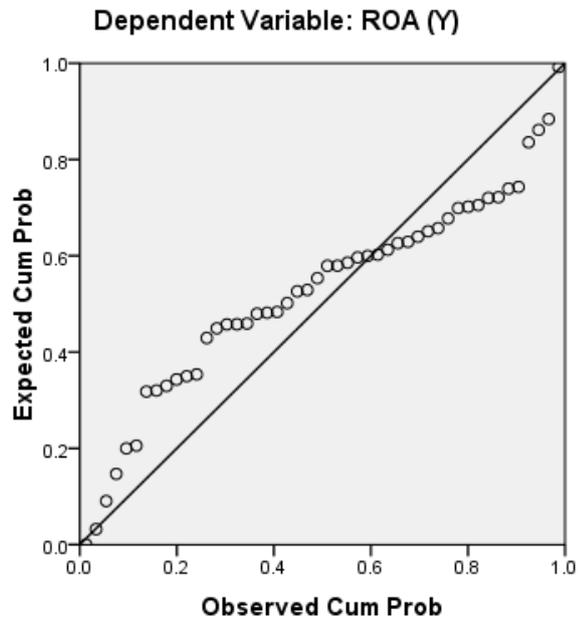
## UJI ASUMSI KLASIK DAN UJI HIPOTESIS

### Lampiran 3 Uji Asumsi Klasik Dan Uji Hipotesis

#### Histogram



**Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

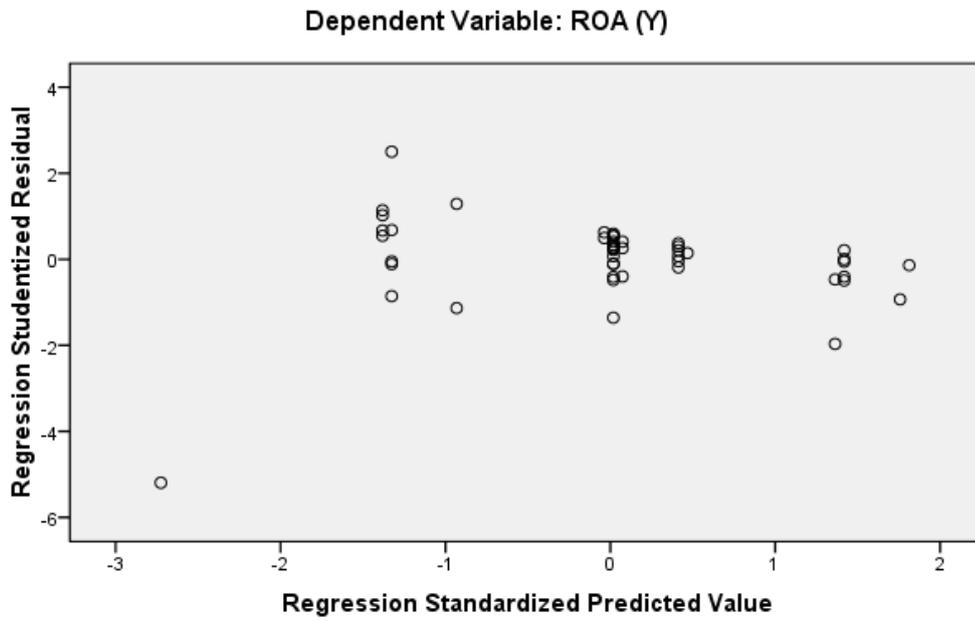


**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-14.438	4.544		-3.177	.003		
	DD (X1)	3.233	1.088	.401	2.971	.005	.923	1.084
	DK (X2)	.948	1.444	.086	.657	.515	.988	1.012
	DPS (X3)	3.366	1.067	.428	3.155	.003	.912	1.096

a. Dependent Variable: ROA (Y)

### Scatterplot



Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-14.438	4.544		-3.177	.003
	DD (X1)	3.233	1.088	.401	2.971	.005
	DK (X2)	.948	1.444	.086	.657	.515
	DPS (X3)	3.366	1.067	.428	3.155	.003

a. Dependent Variable: ROA (Y)

**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	271.769	3	90.590	5.190	.004 <sup>a</sup>
	Residual	768.020	44	17.455		
	Total	1039.789	47			

a. Predictors: (Constant), DPS (X3), DK (X2), DD (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.511 <sup>a</sup>	.261	.211	4.17792

a. Predictors: (Constant), DPS (X3), DK (X2), DD (X1)

b. Dependent Variable: ROA (Y)

## **BIODATA PENULIS**

Nama Lengkap : St Mustaghfiroh  
Tempat Tanggal Lahir : Pati, 24 Juli 1993  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Dk. Gesik RT 01 RW 06 Ds. Prawoto Kec.  
Sukolilo Kab. Pati 59172  
*Contact Person* : 085712102810  
Nama Orang Tua :  
Ayah : Sutarman  
Pekerjaan : Petani  
Ibu : Kusmini  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat Orang tua : Dk. Gesik RT 01 RW 06 Ds. Prawoto Kec.  
Sukolilo Kab. Pati 59172  
Pendidikan : MI Sunan Prawoto Sukolilo Pati lulus tahun 2005  
MTs Sunan Prawoto Sukolilo Pati lulus tahun 2008  
MA Sunan Prawoto Sukolilo Pati lulus tahun 2011  
S1 Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang  
angkatan 2012

Semarang, 23 Mei 2016

Penulis,

**ST MUSTAGHFIROH**

**NIM.122411196**